



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : RSJD dr. ARIF ZAINUDIN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ELIMINA BEKTI SUCI UTAMI**
2. Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN**
3. NHK : **624362**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. **727.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m²/21 m² di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 37.500.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 564 m²/250 m² di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 174.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m²/130 m² di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 143.500.000
4. Tanah Seluas 114 m² di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
5. Tanah Seluas 287 m² di KAB / KOTA KEBUMEN, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 63.000.000
6. Tanah Seluas 432 m² di KAB / KOTA KEBUMEN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 77.000.000
7. Tanah Seluas 1035 m² di KAB / KOTA KEBUMEN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 38.000.000
8. Tanah Seluas 1000 m² di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 159.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. **70.600.000**

1. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
2. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINI BUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000



3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI
Rp. 2.650.000
4. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI
Rp. 1.450.000
5. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2018, HASIL SENDIRI
Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	12.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	251.137.468
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	1.061.237.468
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.061.237.468

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.